BAB IV

LAHAN PERTANIAN DAN KEKUASAAN NEGARA

A. Problem Peruntukan Lahan Pertanian di Kecamatan Bungah

Lahan merupakan sumber daya alam yang strategis bagi pembangunan. Hampir semua sektor pembangunan fisik memerlukan lahan mulai dari sektor pertanian, perekebunan, perumahan, dan industri. Perkembangan kebutuhan akan lahan untuk setiap kegiatan dipengaruhi oleh perkembangan permintaan dari setiap komoditas yang ada. Sejalan dengan meningkatnya aktifitas pembangunan dan pertambahan penduduk, kebutuhan akan lahan juga semakin pesat. Sementara itu ketersediaan dan luas lahan yang ada tidak dapat berubah. Setiap pembangunan yang dilakukan disuatu daerah selalu meningkatkan kebutuhan akan lahan. Hal ini menyebabkan ketersediaan lahan yang ada semakin berkurang. Sehingga jumlah lahan yang ada semakin terbatas. Hal tersebut melahirkan kompetisi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan yang pada gilirannya dapat mendorong terjadinya konflik kepentingan dan melonjaknya harga tanah diatas nilai kewajaran (*overvalued*).

Ketersediaan lahan pertanian terutama lahan sawah di Indonesia semakin terbatas. Sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Konsekuensinya, menurunnya produksi padi untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sehingga mempengaruhi tingkat ketersediaan pangan yang ada. Dalam hal ini, masyarakat yang terkena dampaknya karena pemenuhan kebutuhan pangan banyak mengandalkan dari sumber daya pertanian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemenuhan kebutuhan pangan sendiri merupakan hak asasi yang harus diperoleh bagi manusia. Setiap individu harus bisa menguasai dan memiliki sumber untuk produksi pangan. Sumber tersebut salah satunya yakni berupah tanah yang digunakan untuk memproduksi pangan. Oleh karena itu pelaksanaan *landreform* (reformasi agraria) menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan terlihat bahwa berkurangnya lahan yang ada di Kecamatan Bungah lebih banyak terjadi pada sektor pertanian. Di mana pembangunan yang ada banyak dilakukan di atas lahan pertanian. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya produksi tanaman pangan yang ada di Kecamatan Bungah. Menurunnya produksi tanaman pangan akan berdampak pada ketersediaan pangan yang ada di Kecamatan Bungah. Menurunnya produksi padi juga diungkapkan oleh Sunari, SP selaku Kepala UPT BP_3K Kecamatan Bungah dalam wawancara yang berisi:[1]

> Perkembangan pertanian di Kecamatan Bungah cukup baik, namun dalam beberapa tahun terakhir produksi padi memang mengalami penurunan. Hal itu terjadi karena perubahan musim yang tidak menentu dan hama yang menyerang secara tiba-tiba. Namun petani sekarang dapat menanam padi di sawah dua kali tanam dalam setahun, dibandingkan dulu yang hanya bisa satu kali tanam dalam satu tahun.

Berdasarkan pemaparan dari informan di atas, berikut adalah data penggambaran menurunnya produksi padi yang ada di Kecamatan Bungah dan meningkatnya industri, yang digambarkan dalam diagram batang sebagai berikut:

---

[1] Sunari, SP., Kepala UPT BP_3K Kecamatan Bungah, *Wawancara*, Gresik, 22 Nopember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.1 Perbandingan Luas Lahan dan Produksi Padi[2]

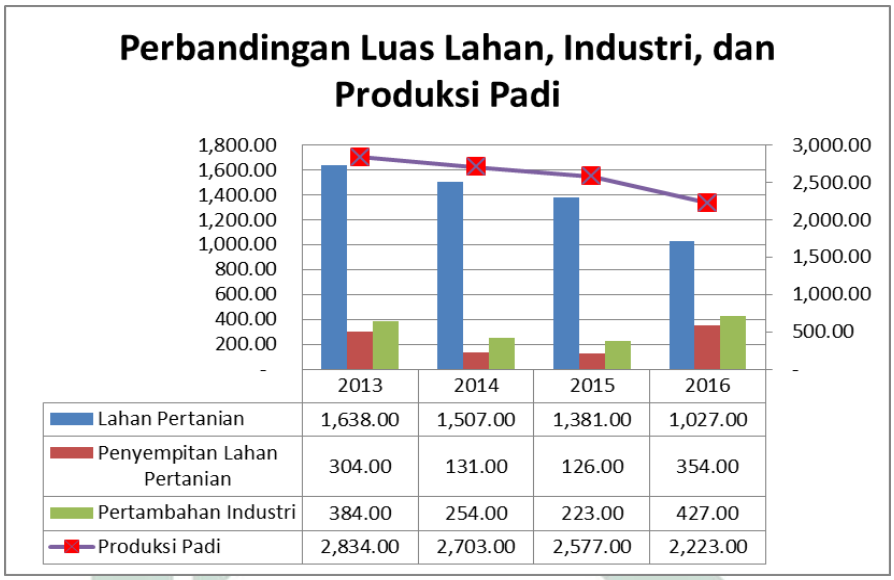

	2013	2014	2015	2016
Lahan Pertanian	1,638.00	1,507.00	1,381.00	1,027.00
Penyempitan Lahan Pertanian	304.00	131.00	126.00	354.00
Pertambahan Industri	384.00	254.00	223.00	427.00
Produksi Padi	2,834.00	2,703.00	2,577.00	2,223.00

Berdasarkan diagram di atas, dapat dilihat bahwa luas lahan pertanian di Kecamatan Bungah tiap tahunnya mengalami penyempitan dan luas lahan industri yang ada mengalami kenaikan. Apabila pembangunan industri yang ada dilakukan secara terus menerus, maka jumlah luas lahan pertanian nantinya akan semakin menyusut dan akan berdampak pada penurunan produksi padi. Sedangkan kebutuhan akan pangan setiap tahunnya meningkat, karena jumlah penduduk yang ada juga bertambah. Dalam hal ini komitmen pemerintah dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan berbasis kedaulatan dan kemandirian pangan perlu untuk lebih ditekankan. Karena pemenuhan pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia. Selain itu juga upaya pemerintah untuk melindungi lahan pertanian berkelanjutan juga harus lebih ditingkatkan. Oleh karena itu peruntukkan area untuk setiap pembangunan yang ada harus diperjelas. Hal ini karena banyak lahan di Kecamatan Bungah yang sebelumnya diperuntukkan

[2] Sumber: Laporan Evaluasi BP_3K Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik Tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk area pertanian banyak berubah menjadi industri. Hal ini sesuai dengan pemaparan dari Juari (petani dan memiliki lahan) selaku dari pihak masyarakat dalam wawancara sebagai berikut:[3]

> Perkembangan pertanian di Kecamatan Bungah, saya rasa semakin hari semakin berkurang karena semakin hari yang bekerja sebagai petani semakin sedikit. Hal ini terjadi karena banyaknya lahan pertanian yang telah berubah menjadi industri, sehingga banyak dari generasi muda yang lebih memilih bekerja tidak sebagai petani.

Padahal berdasarkan perda No. 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah dijelaskan bahwa semua lahan yang ada di Kabupaten Gresik sudah diatur peruntukannya.[4] Termasuk juga lahan yang ada di wilayah Kecamatan Bungah karena sebagian besar yang ada di Kecamatan Bungah sudah diatur peruntukkannya. Wilayah mana yang masuk area pertanian dan mana yang tidak masuk area pertanian, dan mana yang termasuk wilayah industri. Dalam perda RTRW pada pasal 27 ayat 1 juga menjelaskan tentang kebijakan pengembangan kawasan peruntukan pertanian yang meliputi:[5] 1) Pertahanan luasan lahan sawah beririgasi di Kabupaten sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. 2) Pengembangan kawasan perkebunan yang produktif dan ramah lingkungan. Namun realita yang terjadi di lapangan tidak demikian. Di Kecamatan Bungah sendiri banyak lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan industri. Hal ini terlihat dari menurunnya jumlah lahan pertanian yang ada di Kecamatan Bungah. Seperti yang terjadi di desa Kisik dan Abar-Abir. Berdasarkan pengamatan di lapangan terlihat bahwa kondisi lahan pertanian yang ada di

---

[3] Juari, Petani dan Memiliki Lahan, *Wawancara*, Gresik, 30 Nopember 2016.
[4] Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Kabupaten Gresik tentang Rencana Tata Ruang wilayah.
[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Bungah mengalami banyak penurunan dan kemudian beralih fungsi menjadi pabrik. Adapun pernyataan tersebut diperkuat dengan ungkapan yang disampaikan oleh Nur Hadi, S.Pd (Bukan Petani dan Memiliki Lahan) selaku masyarakat dari Desa Abar-Abir yakni sebagai berikut:[6]

> Kondisi pertanian di Kecamatan Bungah sangat memprihatinkan. Karena lahan yang ada semakin hari semakin berkurang dan banyak beralih menjadi pabrik.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Harianto (Petani dan Tidak Memiliki Lahan) selaku masyarakat dari Desa Kisik yang menyatakan sebagai berikut:[7]

> Pertanian di Kecamatan Bungah memiliki banyak penurunan dikarenakan yang menjadi petani sekarang semakin sedikit, karena banyak para pemuda yang tidak mau bekerja di sawah dan memilih kerja di pabrik.

Berdasarkan pemaparan di atas terlihat bahwa peran pemerintah dalam mempertahankan lahan pertanian yang ada justru tidak nampak. Pemerintah dalam hal ini malah terlihat banyak melakukan paksaan secara tidak langsung untuk membujuk masyarakat agar mengikuti apa yang diinginkan. Menurut Gramsci, seorang penguasa mencoba menancapkan hegemoninya dengan kuat kepada mereka yang dikuasai. Agar yang dikuasai dapat tunduk dan patuh pada nilai-nilai yang telah ditetapkan penguasa.[8] Adapun bentuk bujukan dari pemerintah yang dilakukan di Kecamatan Bungah adalah dengan cara menaikkan harga tanah dan juga pajak. Hal ini membuat kegelisahan kepada para petani, selain mahalnya modal yang terjadi pada saat proses tanam juga pajak tanah yang tinggi. Dengan banyaknya kegelisahan yang dialami oleh

---

[6] Nur Hadi, S.Pd.I., Bukan Petani dan Memiliki Lahan, *Wawancara*, Gresik, 17 Desember 2016.
[7] Harianto, Petani dan Tidak Memiliki Lahan, *Wawancara*, Gresik, 23 Desember 2016.
[8] Nur Syam, *Model Analisis Teori Sosial*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), 297.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para petani membuat pemerintah lebih mudah menghegemoni mereka. Apalagi ditambah dengan harga tanah yang dinaikan, hal ini membuat kemungkinan besar petani akan menjual tanah mereka. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Juari (petani dan memiliki lahan) selaku dari pihak masyarakat dalam wawancara sebagai berikut:[9]

> Saya melihat para petani yang menjual lahannya itu karena pendapatan yang diperoleh dari bertani cukup rendah, alasan lain mereka menjual lahan adalah karena sering mengalami kerugian saat menanam padi karean pada saat musim tanam harga yang dikeluarkan mahal dan pada saat musim panen harga jual murah. Selain itu juga alasan lainnya karena harga yang ditawarkan cukup tinggi dan juga dorongan dari anak untuk menjual melihat hasil dari pertanian banyak mengalami kerugian.

Pemerintah Kabupaten Gresik dalam hal ini harus lebih bijaksana dalam melaksanakan politik agraria demi terciptanya kesejahteraan rakyat. Selain itu juga sektor pertanian pangan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Dengan demikian produksi pangan dalam negeri akan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Wacana tentang pencapaian kemandirian dan swasembada pangan juga harus benar-benar dilaksanakan dan tidak hanya sebagai wacana belaka. Karena fakta yang ada di lapangan banyak berkata sebaliknya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Juari (petani dan memiliki lahan) selaku dari pihak masyarakat dalam wawancara sebagai berikut:[10]

> Menurut saya seharusnya hubungan petani dengan pemerintah harus terjalin baik. Dalam hal ini pemerintah harus menguatkan kebutuhan pangan dengan cara tetap mempertahankan lahan pertanian, kalau bisa menambah jumlah luas lahan ada. Karena jika lahan pertanian saja sudah tidak ada maka padi tidak akan bisa diproduksi dan kedepannya apa yang harus dimakan. Jadi pengurangan lahan pertanian yang terjadi sekarang harus dihentikan. Dari pemerintah juga harus memikirkan nasib para

[9] Juari, Petani dan Memiliki Lahan, *Wawancara*, Gresik, 30 Nopember 2016.
[10] Juari, Petani dan Memiliki Lahan, *Wawancara*, Gresik, 30 Nopember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> petani jika lahan yang ada semakin berkurang. Mengingat pangan adalah kebutuhan pokok bagi manusia untuk bertahan hidup.

Lahan pertanian yang ada di Kecamatan Bungah semakin terkikis, selain itu juga jumlah lahan yang ada semakin sempit dan banyak beralih fungsi menjadi industri. Dari pemerintah sendiri perannya tidak begitu nampak untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Berdasarkan temuan di lapangan juga ditemukan bahwa pemberian subsidi pupuk, bantuan modal, bantuan benih, atau penyuluhan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah melalui dinas-dinas terkait hanya dilakukan pada awal-awal pendirian pabrik dan sebelumnya bantuan tersebut tidak turun kepada masyarakat. Sedangkan sekarang pemerintah yang datang ke desa hanya sekedar melakukan survei padahal jumlah lahan pertanian yang ada masih cukup luas. Penyataan ini diperkuat dengan ungkapan dari Alimin selaku Kepala Desa Abar-Abir dengan mengatakan bahwa:[11]

> Pada tahun 2010 dan tahun 2011 kita memperoleh bantuan alat pembuat pupuk, subsidi, maupun bantuan benih. Namun sekarang sudah tidak pernah mendapatkan bantuan tersebut, padahal sektor pertanian di sini masih cukup luas.

Selain itu Alimin selaku Kepala Desa Abar-Abir juga menambahkan bahwa:

> Kalau dari pemerintah kabupaten tidak ada bantuan lain, tetapi kami mendapat bantuan berupa bibit lele dan sayuran dari dinas ketahanan pangan dan juga dari para pengusaha pada awal pembangunan pabrik memberikan bantuan kepada masyarakat yang tanahnya telah dijual. Namun bantuan tersebut diberikan hanya pada tahun 2012 dan 2013 tetapi sekarang tidak mendapat. Pemerintah yang datang ke desa sekarang juga sekedar untuk melakukan survei.

---

[11] Alimin, S.H, M.Pd.I., Kepala Desa Abar-Abir, *Wawancara*, Gresik, 14 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sini dapat dilihat bahwa wacana yang ada hanya sebuah wacana belaka, tanpa ada usaha-usaha yang pasti. Realita yang ada justru lahan pertanian di Kecamatan Bungah semakin sempit, dan kehidupan para petani semakin sulit. Jika memang ada program untuk memperluas lahan pertanian, seharusnya itu benar-benar dilakukan. Faktanya tidak ada, dan pembukaan lahan pengganti baru yang sebelumnya sudah teralihkan pun juga tidak ada. Seharusnya pemerintah bertanggungjawab atas apa yang mereka semua wacanakan. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, salah satunya yaitu adanya pembangunan pelabuhan internasional. Seperti yang disampaikan oleh Eddy Pranowo, SP Ketua Seksi Ketersediaan Pangan Kabupaten Gresik yang menyatakan bahwa:[12]

> Menurut saya itu terjadi karena adanya pembangunan pelabuhan internasional di wilayah utara yang mengakibatkan harga tanah di sana sangat tinggi. Hal tersebut juga karena perkembangan kawasan yang tumbuh dan berkembang yang mengakibatkan maka harga tanah yang ada semakin tinggi. Untuk menjual lahannya itu semua tergantung dari masyarakat petani itu sendiri dan pemerintah dalam hal ini tidak ikut campur.

Adanya pembangunan pelabuhan internasional menyebabkan harga tanah di wilayah yang dekat dengan pelabuhan tersebut menjadi semakin tinggi. Hal ini yang kemudian membuat beberapa petani dan pemilik lahan pertanian bersedia menjual lahannya kepada para pemodal. Sedangkan Muhammad Ali Ishaq, S.E selaku Kepala Desa Kisik juga mengatakan:[13]

---

[12] Eddy Pranowo, SP., Ketua Seksi Ketersediaan Pangan Kabupaten Gresik, *Wawancara*, Gresik, 14 Nopember 2016.

[13] Muhammad Ali Ishaq, S.E., Kepala Desa Kisik, *Wawancara*, Gresik, 19 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Sebagian besar lahan yang ada di desa Kisik sudah bukan milik dari warga desa Kisik. Karena sudah dibeli oleh para pengusaha dari kota, ada yang menjadi milik pengusaha dari Gresik dan ada yang dari Surabaya.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan para petani mau menjual lahan pertaniannya. Salah satunya adalah pajak tanah yang menurut para petani terlalu tinggi. Dari sini dapat terlihat bahwa pemerintah berusaha untuk menghegemoni masyarakat Kecamatan Bungah dengan menaikkan pajak tanah yang ada. Sehingga masyarakat banyak yang mengambil keputusan untuk menjual lahan pertaniannya kepada para pengusaha dan menjadi lahan industri. Dengan banyaknya pembangunan industri membuat pendapatan asli daerah juga semakin tinggi, karena penerimaan pajak dari pabrik yang dibangun akan semakin besar. Selain itu juga kegiatan industri dapat menghasilkan pendapatan yang cukup besar dibandingkan dengan pertanian. Dari sini terlihat bahwa masyarakat berupaya untuk menginternalisasi diri mereka untuk patuh serta mengikuti nilai dan norma yang telah diungkapkan oleh pemimpin.

B. Bentuk Hegemoni Negara dalam Politik Agraria di Kecamatan Bungah

Hegemoni memiliki keterkaitan erat dengan konsep kekuasaan. Gramsci melihat hegemoni sebagai praktik dua arah dari dua hubungan yang bersifat subordinasi, yakni kekuasaan negara borjuis dan kelas buruh.[14] Konsepsi hegemoni Gramsci mengacu kepada hubungan antara apa yang disebutnya *civil society* dan *state* atau negara. Dimana keduanya ada pada level suprastruktur.

---

[14] Daniel Hutagalung, "Hegemoni, Kekuasaan dan Ideologi" *Jurnal Pemikiran Sosial, Politik dan Hak Asasi Manusia*, Vol.74 No. 12 (Diponegoro 2004),1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Politik agraria memiliki keterkaitan erat dengan hegemoni, karena politik agraria memiliki hubungan dua arah juga, yakni petani sebagai masyarakat sipil dan negara sebagai pembuat kepentingan. Politik agraria merupakan kebijakan pemerintah yang ditunjukan pemerintah yang bertujuan untuk memelihara, mengawetkan, memperuntukkan, mengambil manfaat dan menguusahakan tanah untuk mensejahterakan rakyat. Yang mana dalam pelaksanaanya memiliki hubungan erat dengan politik dan hukum.

Menurut Gramsci, hegemoni adalah sebuah hubungan yang bukan melalui cara dominasi lewat cara-cara kekerasan, tetapi terbentuk atas dasar persetujuan suatu cara-cara kepemimpinan politik. Intinya, bagaimana mengorganisir kesepakatan atau persetujuan bersama.[15] Jika ditarik dalam pengertian ini, maka politik pangan bisa dikatakan sebagai sebuah bentuk lain dari hegemoni. Karena politik pangan bentuknya halus dan tidak memakai cara-cara kekerasan di dalamnya, dan juga politik pangan dijalankan dengan cara membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya politis.

Dalam hal ini pemerintah berupaya untuk melakukan alih fungsi lahan pertanian. Adapun bentuk alih fungsi lahan pertanian ada dua yakni; *pertama*, alih fungsi lahan yang dilakukan secara langsung oleh pemilik lahan yang bersangkutan atau petani, *kedua*, alih fungsi lahan pertanian yang diawali dengan alih penguasaan lahan. Pemilik lahan pertanian menjual lahan mereka kepada pihak lain yang akan memanfaatkannya untuk usaha non pertanian. Pemilik lahan secara tidak langsung dianggap mengalihfungsikan lahan pertanian tersebut.

[15] Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah Kabupaten Gresik dalam hal ini setidaknya dapat menghegemoni masyarakat untuk mengembangkan potensi pangan lokal di wilayah masing-masing, agar pemenuhan kebutuhan pangan yang ada lebih terjamin. Namun sayangnya, pemerintah hadir dalam hegemoni yang tidak baik. Hegemoni dalam pangan yang ada di Kecamatan Bungah tidak berjalan dengan baik. Pemerintah tidak benar-benar memiliki kesungguhan untuk mengembangkan pangan lokal. Selain itu juga tidak terdapat bantuan dari pemerintah kepada masyarakat terkait pertanian. Ini merupakan indikasi bahwa tidak ada usaha baik dari pemerintah dalam hal menciptakan ketahanan pangan di sini.

Satu hal lain yang menjadi penting dalam pemenuhan pangan adalah hegemoni adalah tentang keterjangkauan. Maksud dari keterjangkauan adalah mudahnya memperoleh bahan tanaman pertanian sebagai modal, misal terjangkaunya harga benih, harga pupuk, dan lain sebagainya. Selain itu juga, harus ada hasil yang sesuai dari yang diharapkan. Artinya, ketika terjadi panen, harga yang dipakai tidak merugikan petani dan lebih menguntungkan agar proses tanam menanam selanjutnya dapat berjalan baik.

Fakta yang ada di lapangan adalah tidak adanya kontrol dari pemerintah soal harga panen ini. Harga panen justru rendah dan merugikan petani. Padahal dalam politik pangan, masalah keterjangkauan ini bisa dibilang sangat krusial. Pemerintah harusnya bisa mengatur harga pasar, karena pemerintah adalah agen yang dapat membuat regulasi. Namun yang terjadi di Kecamatan Bungah adalah pembiaran dari pemerintah baik sebelum maupun sesudah proses tanam. Harga-harga menjelang proses tanam tinggi, sehingga petani membutuhkan modal yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak. Sementara pada proses panen, semua harga turun dan membuat kalkulasi antara proses tanam dan panen tidak seimbang dan membuat petani merugi.

Lahan merupakan sumber daya yang bersifat langka karena jumlahnya yang tidak dapat bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat. Dinamika penggunaan lahan bisa berkembang ke arah kesejahteraan masyarakat dan juga sebaliknya. Apabila penggunaan lahan dapat digunakan dengan baik dan sesuai dengan fungsinya maka kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Sebaliknya apabila lahan yang ada banyak dialih fungsikan menjadi industri maka kondisi lahan yang ada akan menurun kualitasnya. Berdasarkan pengamatan di lapangan terlihat bahwa lahan yang ada di Kecamatan Bungah khusunya lahan pertanian, telah banyak yang beralih fungsi menjadi industri. Peralihan tersebut terjadi karena beberapa faktor salah satunya adalah meningkatnya pembangunan industri yang ada. Hal tersebut dipicu karena tingginya harga tanah yang ditawarkan. Selain itu juga tidak adanya generasi penerus yang bekerja pada sektor pertanian, karena para generasi muda lebih banyak yang memilih bekerja pada sektor industri. Minimnya generasi pemuda yang mau bekerja pada sektor pertanian merupakan masalah yang cukup mendasar. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Ali Ishaq, S.E selaku Kepala Desa Kisik yang mengatakan bahwa:[16]

> Permasalahan yang mendasar adalah ketersediaan tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian semakin sulit, karena sangat minim yang mau bekerja di sektor pertanian dan lebih banyak memilih bekerja disektor industri.

[16] Muhammad Ali Ishaq, S.E., Kepala Desa Kisik, *Wawancara*, Gresik, 19 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meluasnya lahan industri yang semakin besar dikarenakan adanya pembangunan pelabuhan internasional. Hal tersebut menyebabkan banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi semakin besar. Hal ini terjadi karena lokasi lahan pertanian yang ada berdekatan dengan jalan raya. Adapun pemicu lain yang menyebabkan banyaknya pembangunan industri di Kecamatan Bungah karena wilayah tersebut berada di wilayah pantura, yang merupakan jalur utama dan banyak di lalui oleh kendaraan baik dari dalam maupun luar kota. Oleh karena itu apabila dibangun perindustrian akan cukup strategis karena masuk wilayah pantura. Selain itu juga perizinan untuk mendirikan industri di wilayah Kabupaten Gresik khususnya di Kecamatan Bungah juga tidak terlalu rumit. Kecamatan Bungah nantinya akan menjadi pusat industri baru dan akan ramai dikunjungi, karena menjadi pusat perdagangan. Oleh karena itu mulai tahun 2012 pembangunan industri yang ada khususnya di Kecamatan Bungah juga semakin pesat. Berikut adalah data yang digambarkan dalam diagram batang sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

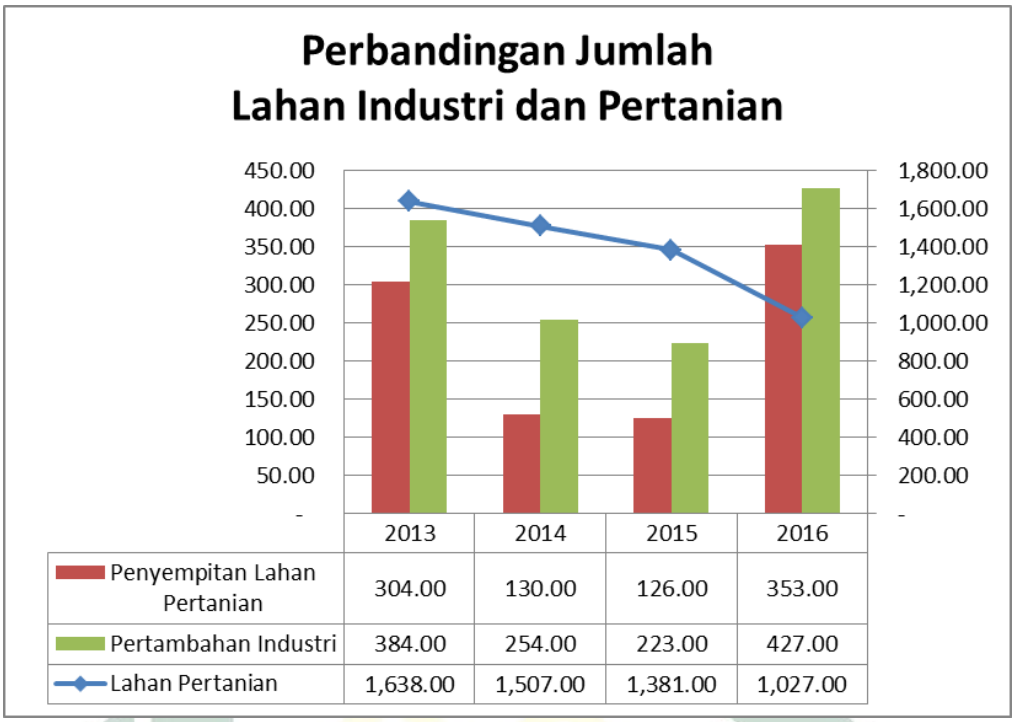

	2013	2014	2015	2016
Penyempitan Lahan Pertanian	304.00	130.00	126.00	353.00
Pertambahan Industri	384.00	254.00	223.00	427.00
Lahan Pertanian	1,638.00	1,507.00	1,381.00	1,027.00

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah lahan pertanian yang ada di Kecamatan Bungah dari tahun ke tahun mengalami penyempitan, sedangkan jumlah lahan industri yang ada mengalami pertambahan. Dalam kurun waktu 4 tahun dapat diketahui bahwa di Kecamatan Bungah terjadi penyempitan lahan pertanian sebanyak 913 hektar, apabila dirata-rata penyempitan yang terjadi di setiap tahunnya kurang lebih sebanyak 182,6 hektar. Jumlah lahan industri yang ada dalam kurun waktu 4 tahun mengalami peningkatan sebanyak 1288 hektar, apabila dirata-rata per tahunnya mengalami perluasan sebanyak 322 hektar. Berikut adalah nama industri yang ada di Kecamatan Bungah dan bertepatan di perbatasan antara Desa Kisik dan Abar-Abir, antara lain sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.1 Nama Industri[17]

No.	Nama	Lokasi	Industri
1.	PT. ANEKA TIMBER DAN FURNITURE	Desa Kisik Kecamatan Bungah	*Mouding, furniture,* dan bahan kayu.
3.	PT. ANEKA TIMBER DAN FURNITURE	Desa Kisik Kecamatan Bungah	*Moulding*, komponen bahan bangunan, dan komponen dari kayu
2.	PT. INTER WOOD	Desa Kisik Kecamatan Bungah	Ubin kayu, lantai kayu, dan *blockparket.*
8.	PT. SYM GREEN	Desa Kisik Kecamatan Bungah	Stik es krim
6.	CV. SUMBER MAS JAYA	Desa Abar-Abir Jl. Raya Bungah, KM. 16 Kecamatan Bungah	Kecap manis, kecap asin, dan saos
4.	CV. CIPTA MANUNGGAL ABADI	Desa Kisik Kecamatan Bungah	*Moulding* dan kayu meranti.
7.	CV. ISAKO	Kecamatan Bungah	Pupuk fosfat alam dan pupuk dolomit.
5.	PT. INTER WOOD	Desa Kisik Kecamatan Bungah	Industri barang bangunan dari kayu
9.	CV. BINTANG TANI	Kecamatan Bungah	Pupuk fosfat alam
10.	CV. EMA JAYA	Kecamatan Bungah	Phospat alam dan dolomit

Dari tabel di atas telah menunjukan bahwa di Kecamatan Bungah sudah bertransformasi menjadi kawasan industri baru. Terlihat bahwa mulai dari tahun 2004 terdapat pembangunan industri yang ada di Kecamatan Bungah dan semakin

[17] Sumber: Perizinan Usaha Industri Kabupaten Gresik Tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memuncak semenjak tahun 2012 sampai tahun 2016. Industri yang ada sudah mendapatkan izin dari pemerintah dan nomor perizinan juga sudah terdaftar.

Untuk mendirikan sebuah indusri harus melalui ketentuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Sebagai langkah awal dalam kegiatan investasi di Kabupaten Gresik, terlebih dahulu para investor harus menempuh tahapan perizinan. Proses perizinan ini merupakan kebijakan yang bersifat mengatur dan melindungi, tidak saja untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Gresik, tetapi juga untuk kepentingan para investor sebagai bentuk kepastian hukum.[18]

Tahapan dalam proses investasi adalah, pertama, tahap informasi, yakni para investor harus memberikan informasi tentang investasi macam apa yang akan dikembangkan. Kedua, harus mendapatkan izin dari pihak yang terkait, dalam hal ini izin yang diperlukan adalah dari Bappeda untuk rekomendasi jenis investasi, Dinas Pertanahan untuk rekomendasi tempat, dan Dinas Pekerjaan umum untuk Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).[19]

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 107 tahun 2015, tentang Izin Usaha Industri (IUI) pasal 2 ayat 1 menyebutkan, bahwa setiap usaha industri wajib memiliki IUI. Daftar industri yang ada di Kecamatan Bungah tidak melanggar ketentuan ini karena perusahaan yang ada di Kecamatan Bungah telah memiliki IUI.

---

[18] Profil Investasi Kabuparen Gresik Tahun 2002, 71.
[19] Ibid., 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi, dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian pasal 14 ayat 2a menyebutkan bahwa perwilayahan industri harus dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Hal ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan, bahwa dalam rencana tata ruang wilayah, Kecamatan Bungah bukanlah diperuntukkan untuk wilayah industri. Artinya, pembangunan industri di Kecamatan Bungah ini sebetulnya bermasalah karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah.

Dengan berdirinya industri di Kecamatan Bungah yang notabene bukan daerah industri mengindikasikan adanya pembiaran dari pemerintah, serta pengawasan dari pemerintah terbilang longgar. Pembiaran ini bukan dengan tanpa alasan, karena dengan banyaknya industri yang berdiri akan semakin menambah pemasukan asli daerah.

Pertumbuhan industri akan baik dilihat dari satu sisi, tetapi harus baik pula dilihat dari sisi lainnya. Pembangunan industri yang tidak pada tempatnya akan menjadikan permasalahan baru. Pembangunan industri yang ada di Kecamatan Bungah mengganggu proses pertanian yang ada di sana. Sehingga politik pangan yang dicanangkan akan sia-sia belaka, karena faktanya lahan pertanian semakin menyempit dan petani lebih banyak mengalami kerugian. Disini bisa dilihat bahwa perhatian dari pemerintah tidak berjalan dengan seimbang.

Dari sini terlihat bahwa negara sebagai pembuat dan pelaksana kepentingan tentu memiliki gagasan serta wacana dalam proses pemerintahannya. Gagasan dan wacana tersebut tertulis dalam peraturan yang ada. Namun progam tersebut hanya sebatas wacana belaka dan realita yang ada di lapangan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian. Pemerintah dalam hal ini perlu lebih menekankan lagi komitmen untuk menciptakan kedaulatan pangan. Karena kedaulatan pangan merupakan cerminan hak untuk menentukan kebijakan pangan secara mandiri. Sedangkan terciptanya kemandirian pangan merupakan wujud dari kemampuan negara untuk memproduksi pangan. Berikut adalah hasil analisis dari pihak pemerintah yang telah digabungkan dengan teori:

Tabel 4.2 Analisis Informan

No.	Informan	Data	Teori
1.	Eddy Pranowo, SP (Dinas Ketahanan Pangan)	• Pertanian berkembang baik dan produksi pangan meningkat • Adanya kendala peralihan lahan pertanian ke industri • Masyarakat yang terdampak diberi bantuan bibit lele dan sayur	Hegemoni karena negara hanya melihat dari sisi keuntungan tidak ada tindakan untuk mencegah terjadinya peralihan lahan dan mencoba meredam amarah masyarakat dengan cara memberi bantuan.
2.	Sunari, SP (Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bungah)	• Tidak terjadi penyusutan lahan pertanian • Pemerintah tidak terlibat dalam proses jual beli	Hegemoni karena negara dalam hal ini berupaya menutupi semua penyusutan yang terjadi dan bertindak seolah-olah tidak terlibat.
3.	Dra. Hj. Wafiroh Ma'sum (Komisi C DPRD	• Pembangunan sudah mengikuti RTRW • Pembangunan	Hegemoni karena negara tetap menginginkan pembangunan industri dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Kabupaten Gresik)	industri tetap ada. • Realisasi program pemberian cadangan pangan kepada para petani.	memberikan program cadangan pangan agar agar mengikuti perkembangan industri.

Ketiga pendapat yang disampaikan oleh narasumber terlihat bahwa negara ingin agar industri yang ada tetap berjalan dan juga bertindak seolah-olah tidak terlibat dalam pembangunan industri. Selain itu juga dalam hal ini negara mencoba menghegemoni masyarakat dengan cara memberikan bantuan sebagai dampak dari pembangunan industri. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat diam dan tidak melakukan protes baik kepada pemerintah maupun investor karena lahan yang ada semakin berkurang. Dari data informan di atas yang sudah dikaitkan dengan teori hegemoni juga sudah terlihat bahwa apa yang telah diwacanakan oleh pemerintah tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan.

Menurut Gramsci, agar kekuasaan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan, harus ada upaya memaksa yang mampu membujuk masyarakat dan pranata-pranata untuk taat pada mereka yang berkuasa. Bentuk paksaan yang dilakukan bukanlah bentuk baku, melainkan dilakukan dengan bentuk yang lebih halus, salah satunya yang terjadi di Kecamatan Bungah yakni dengan menaikkan pajak tanah. Selain itu juga kelangkaan pupuk dan mahalnya harga bibit yang terjadi pada saat proses tanam menanam. Sedangkan pada saat musim panen tiba harga yang terjual terbilang cukup murah. Hal tidak sesuai dengan diinginkan karena dari petani banyak yang mengalami kerugian. Padahal yang pemerintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilki peran mengatur harga yang ada di pasaran, namun peran pemerintah dalam hal ini tidak begitu nampak.

Hegemoni merupakan cara untuk mempertahankan kekuasaan atas kelas-kelas yang ada dengan cara mensupremasi kelompok atas kelompok lainnya. Menurut Gramsci untuk mempertahankan kekuasaan tidak bisa dilakukan dengan cara yang represif melainkan dengan cara yang persuasif.[20] Artinya, jalan kekerasan tidak bisa diambil, karena kemungkinan akan terjadi perlawanan maka dari itu dalam melakukan hegemoni semuanya harus dilakukan dengan cara yang persuasif untuk mempertahankan kekuasaannya lebih baik.

Dari sini terlihat bahwa yang menjadi salah satu faktor masyarakat petani mau menjual lahan pertanian karena adanya supremasi yang dilakukan oleh negara dalam bentuk tidak langsung. Teori di atas sesuai dengan realita yang ada dilapangan, bahwa negara banyak melakukan hegemoni masyarakat mulai dari pengaturan harga sampai pemberian bantuan. Hal ini diperkuat dengan ungkapan dari para petani yang mengeluhkan bahwa banyaknya kerugian yang dialami dalam sektor pertanian, seperti yang diungkapkan oleh Nur Hadi, S.Pd (bukan petani dan memiliki lahan) selaku dari masyarakat melalui wawancara sebagai berikut:[21]

> Penyebab banyaknya kerugian yang terjadi banyak, salah satunya dari harga bibit pada saat musim tanam terbilang cukup mahal dan setelah musim panen harga yang terjual cukup murah. Dari ini para petani banyak mengalami kerugian, selain faktor harga juga faktor cuaca yang tidak

[20] Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci Negara & Hegemoni*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 115.
[21] Nur Hadi, S.Pd.I., Bukan Petani dan Memiliki Lahan, *Wawancara*, Gresik, 17 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> menentu dan hama yang menyerang secara tiba-tiba menyebabkan banyaknya hasil dari tanaman padi yang dihasilkan tidak sesuai harapan.

Namun sebagai bentuk penolakan terdapat beberapa pertani yang memutuskan untuk tidak menjual lahan pertanian. Mereka berusaha untuk mempertahankan lahan pertanian demi anak cucu di masa depan. Jika lahan pertanian sudah tidak ada, maka apa yang akan dimakan di masa depan nanti. Dan juga lahan pertanian merupakan komponen utama untuk memperoduksi pangan. Dalam kondisi seperti ini, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik justru tidak melakukan upaya untuk melindungi lahan pertanian yang ada di Kecamatan Bungah. Namun dari pihak pemerintah malah memberikan bantuan kepada para petani yang sudah menjual lahan pertaniannya dengan bantuan sembako. Padahal sebelumnya bantuan tersebut hanya diperuntukkan untuk mereka yang miskin. Selain itu juga perhatian yang diberikan oleh dinas terkait hanya dilakukan pada awal-awal pembangunan industri saja. Hal tersebut dilakukan untuk meredam amarah dari masyarakat. Setelah pembangunan industri, masyarakat Kecamatan Bungah kurang begitu mendapatkan perhatian lagi apalagi bantuan dari dinas-dinas terkait dan pemerintah Kabupaten Gresik. Hal tersebut dinyatakan oleh Muhammad Ali Ishaq, S.E selaku Kepala Desa Kisik yang mengatakan bahwa:[22]

> Bantuan dari dinas-dinas itu hampir tidak ada, karena dalam kenyataannya pupuk mahal dan para petani mengalami kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Selain itu kedatangan dari dinas-dinas yang pernah berkunjung ke desa Kisik hanya sebatas melalukan survei, tidak ada bantuan secara nyata yang dilakukan, baik dalam bentuk langsung misal memberikan pupuk atau obat untuk padi maupun bantuan tak langsung seperti penyuluhan terkait pertanian.

---

[22] Muhammad Ali Ishaq, S.E., Kepala Desa Kisik, *Wawancara*, Gresik, 19 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal yang sama juga disampaikan oleh Alimin selaku Kepala Desa Abar-Abir dengan mengatakan bahwa:[23]

> Kalau dari pemerintah kabupaten tidak ada bantuan secara langsung, tetapi kami mendapat bantuan berupa bibit lele dan sayuran dari dinas ketahanan pangan dan juga dari para pengusaha pada awal pembangunan pabrik memberikan bantuan kepada masyarakat yang tanahnya telah dijual. Namun bantuan tersebut diberikan hanya pada tahun 2012 dan 2013 tetapi sekarang tidak mendapat. Pemerintah yang datang ke desa sekarang juga sekedar untuk melakukan survei.

Temuan yang ada di lapangan mengindikasikan bahwa sebenarnya pemerintah tidak pernah benar-benar memiliki niat untuk merealisasikan atas apa yang telah mereka rumuskan. Peran negara terlihat sangat minim dalam hal membangun kedaulatan pangan yang ada di Kecamatan Bungah. Karena pada kenyataannya realisasi yang ada di lapangan tidak sesusai dengan apa yang dirumuskan. Negara dalam hal ini malah terlihat banyak mengehegemoni masyarakat petani agar mau menjual lahan pertanian yang ada. Oleh karena itu terkait dengan konsep hegemoni yang diungkapkan oleh Gramsci terdapat tiga bidang yang terkait dengan hegemoni yaitu ekonomi, negara dan masyarakat. Dalam konsep hegemoni, poin yang menjadi sangat fundamental adalah ekonomi, karena bagaimana pun tujuan akhir dari hegemoni adalah ekonomi itu sendiri. Kabupaten Gresik yang sudah dikenal sebagai kota industri yang besar di Jawa Timur akan lebih gencar memfokuskan diri pada pembangunan disektor industri. Karena faktanya, pembangunan industri lebih banyak menyumbang pendapatan yang ada di pemerintahan. Akibatnya, harus ada sektor usaha lain yang

[23] Alimin, S.H, M.Pd.I., Kepala Desa Abar-Abir, *Wawancara*, Gresik, 14 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikorbankan untuk pembangunan industri, dalam hal ini yang menjadi korban adalah sektor pertanian.

Pemerintah Kabupaten Gresik banyak memberikan bantuan kepada masyarakat petani untuk meredam agar mereka tidak sampai melakukan protes akibat banyaknya pembangunan industri yang dilakukan dan bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang langsung terkena dampak. Dalam hal ini pemerintah memberikan bantuan berupa cadangan makanan. Namun bantuan diberikan pemerintah kepada para masyarakat petani yang terkena alih fungsi lahan akibat pembangunan indusri tidak memiliki dampak apa-apa. Pemberian bantuan cadangan makanan hanya mengganjal perut para petani yang lapar, cadangan makanan tidak akan dapat berdampak pada sektor pertanian. Pemberian bantuan tersebut malah terlihat bahwa negara hanya ingin meredam amarah masyarakat. Kalau negara mau melihat sebenarnya yang dibutuhkan oleh para petani adalah lahan pertanian yang luas dengan harga pupuk yang murah. Selain itu juga penjualan harga panen yang seimbang dengan harga tanam, obat-obatan untuk tanaman, modal benih, serta alat-alat traktor yang menunjang produktifitas dan efektifitas pertanian. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Alimin, S.H, M.Pd.I selaku kepala Desa Abar-abir yang mengatakan lewat wawancara:[24]

> Pemberian bantuan tersebut diperuntukkan bagi beberapa petani saja, terutama yang memiliki lahan cukup luas dan masih banyak petani yang tidak mendapatakan bantuan tersebut. Padahal dari beberapa petani yang mendapatkan kebanyakan itu mereka yang cukup mampu, saya sendiri ketika diprotes oleh beberapa warga yang tidak mendapat bantuan cukup bingung untuk menjelaskan karena datangnya bantuan langsung dari pemerintah, kami di sini hanya sebagai penyalur.

[24] Alimin, S.H, M.Pd.I., Kepala Desa Abar-Abir, *Wawancara*, Gresik, 14 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberian cadangan makanan tidak akan memiliki kontribusi untuk memberikan solusi atas segala macam permasalahan masyarakat petani. penguatan komitmen pemerintah dalahm hal mewujudkan ketahanan pangan harus benar-benar dilaksanakan. Dalam hal ini penegasan tentang politik pangan baik mengenai lahan pertanian maupun peningkatan swasembada pangan perlu dilakukan. Sehingga semua kebutuhan pangan pada semua bangsa sampai pada tingkat lokal dapat tercukupi. Oleh karena itu pemerintah harusnya melakukan dan merealisasikan semua wacana yang telah dibuat. Selayaknya negara memiliki berbagai fungsi baik membuat, melaksanakan dan mengawasi semua kebijakan yang telah dibuat.

C. Relasi Negara Dan Masyarakat dalam Politik Agraria di Kecamatan Bungah

Relasi merupakan hubungan yang terjalin antara satu dengan yang lain untuk tujuan tertentu. Demi terjalinnya sebuah relasi yang baik tentunya harus diikuti dengan cara-cara yang baik, misal dengan intens melakukan komunikasi, melakukan pertemuan dan berdiskusi, atau dengan cara-cara lain yang bisa menunjang hubungan kedua pihak tersebut. Relasi dapat dilakukan oleh siapa saja karena setiap manusia melakukan suatu kerja sama. Sebuah relasi juga dapat dilakukan oleh masyarakat dengan lembaga negara. Salah satu contohnya adalah relasi yang terjalin antara masyarakat petani dengan dinas pertanian atau dinas ketahanan pangan.

Kecamatan Bungah merupakan salah satu wilayah yang memiliki luas lahan pertanian yang cukup luas. Namun beberapa tahun terakhir jumlah lahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanian yang ada di Kecamatan Bungah banyak mengalami penurunan. Menurunnya jumlah lahan pertanian yang ada dikarenakan banyaknya pertumbuhan industri. Jumlah luas lahan indutri yang ada di Kecamatan Bungah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sedangkan jumlah lahan pertanian yang ada semakin menyempit di tiap tahunnya. Pembangunan industri yang banyak dilakukan terjadi karena kurang terjalinnya relasi yang baik antara masyarakat dengan negara. Dalam melakukan pembangunan negara kurang banyak melihat kondisi pertanian yang ada. Hal ini seperti yang diungkapakan oleh Harianto (Petani dan Tidak Memiliki Lahan) selaku masyarakat Desa Kisik sebagai berikut:[25]

> Menurut saya pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi pangan yang ada di negara ini, sebelum melakukan pembangunan harus melihat kondisi sekitar. Karena pangan sendiri merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia untuk bertahan hidup. Dan juga pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan keadaan kaum petani, karena bagaimanapun juga petani yang memproduksi beras dan juga kaum petani harus berani menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.

Pembangunan lahan pabrik yang terjadi banyak mempengaruhi mata pencaharian masyarakat. Hal itu karena pembangunan yang ada banyak dilakukan di atas lahan pertanian. Sehingga masyarakat yang sebelumnya bekerja pada sektor pertanian, sekarang banyak yang tidak dapat bekerja lagi pada sektor pertanian. Melihat kondisi yang ada sekarang kedepannya pemenuhan kebutuhan pangan akan menjadi sulit karena jumlah lahan pertanian yang ada semakin sedikit sedangkan jumlah penduduk tiap tahunnya bertambah. Selain itu juga dari para generasi muda lebih banyak yang berminat untuk bekerja pada sektor industri

[25] Harianto, Petani dan Tidak Memiliki Lahan, *Wawancara*, Gresik, 23 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daripada sektor pertanian. Hal ini menyebabkan tidak adanya regenerasi petani dalam sektor pertanian. Dalam proses tanam menanam sendiri cukup banyak mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan tenaga yang dibutuhkan saat proses tanam sangat minim. Dari temuan di lapangan masyarakat sebelum melakukan tanam padi harus mencari tenaga untuk menanam terlebih dahulu, karena dari generasi banyak yang sudah tidak tertarik untuk bekerja di sektor petanian. Hal ini diungkapkan oleh Muhammad Ali Ishaq, S.E selaku Kepala Desa Kisik Kepala Desa Kisik yang mengatakan:[26]

> Untuk proses tanam padi cukup mengalami kesulitan, karena tenaga yang dibutuhkan untuk proses tanam sangat minim. Selain itu saat proses tanam padi harus mengantri karena tenaga yang ada sangat minim, karena dari generasi muda banyak yang tidak mau bekerja sebagai petani. Hal ini jauh berbeda dengan zaman saya dulu sewaktu masih anak-anak yang harus bekerja di sawah.

Dari sini dapat terlihat adanya pergeseran budaya dari masyarakat di Kecamatan Bungah yang awalnya banyak melakukan kegiatan bercocok tanam bergeser sektor industri. Apabila hal ini terus menerus terjadi maka produksi padi yang ada akan terus menerus turun. Tidak menutup kemungkinan nantinya di wilayah Kecamatan Bungah khususnya daerah utara produksi padi sulit ditemui. Karena dari pemikiran masyarakat sudah banyak yang beralih kesektor indutri. Kebanyakan dari mereka khususnya generasi muda berfikir bahwa pendapatan yang diperoleh dari sektor industri lebih banyak daripada sektor pertanian.

Penguatan komitmen dari pemerintah dalam hal pemenuhan pangan harus lebih ditekankan. Perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan juga harus

[26] Muhammad Ali Ishaq, S.E., Kepala Desa Kisik, *Wawancara*, Gresik, 19 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih ditekankan. Dalam perda No.7 Tahun 2015 tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) juga telah tertulis bahwa lahan pertanian yang ada telah ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan makanan pokok bagi kemadirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Wacana pemerintah tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan juga sudah tertulis, namun pelaksanaan dilapangan tidak demikian. Jumlah lahan pertanian yang ada di Kecamatan Bungah setiap tahunnya masih mengalami penyempitan bahkan setelah adanya perda tersebut. Oleh karena itu agar kebutuhan pangan yang semakin meningkat dapat terus terpenuhi diperlukan komitmen yang harus ditunjukan dari pemerintah untuk menciptakan kedaulatan dan kemandirian pangan.

Negara dalam hal ini tidak dapat bergerak sendiri begitupun dengan masyarakat, kedua elemen itu harus saling berkesinambungan. Dalam hal ini seharunya pemerintah tidak hanya menciptakan ruang bagi industri, tetapi juga menciptakan ruang bagi para petani. Semua cita-cita yang baik harus direncanakan dan dilaksanakan dengan baik agar dapat tercapai. Setelah semua progam dan wacana yang sudah direncanakan dengan baik, seharusnya pelaksanaannya dilapangan juga harus berjalan dengan baik. Selain itu juga dari masyarakat khususnya para petani juga harus ikut memikirkan kondisi pangan kedepannya. Karena bagaimanapun juga mereka yang memproduksi padi dan memiliki lahan pertanian. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Nur Hadi, S.Pd (bukan petani dan memiliki lahan) selaku dari masyarakat, yang mengungkapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa seharusnya petani juga ikut memikirkan pa yang di makan kedepannya jika lahan pertanian yang ada banyak dijual, melalui wawancara sebagai berikut:[27]

> Saya tidak tertarik untuk menjual lahan, karena lahan pertanian merupakan hal yang penting untuk memproduksi padi, kalau lahan yang ada dijual dan banyak dialih fungsikan menjadi non pertanian lantas apa yang akan dimakan kedepannya, karena lahan yang digunakan untuk menanam padi banyak yang beralih fungsi.

Pembangunan pertanian berkelanjutan bertujuan untuk memutus ketergantungan petani terhadap input eksternal dan penguasa pasar yang mendominasi sumber daya agraria. Oleh karena itu pembangunan politik pangan berbasis kedaulatan dan kemandiran pangan didasarkan atas pertimbangan kondisi lingkungan internal dan eksternal serta analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan. Dalam hal ini dilakukannnya politik pangan bertujuan untuk mencipatakan komitmen pemerintah dalam hal mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Oleh karena itu relasi antara negara dan masyarakat harus terjalin dengan baik, baik secara struktural maupun sistematis. Karena kemandirian pangan merupakan wujud kemampuan negara untuk memproduksi pangan di dalam negeri secara bermartabat. Dari pemaparan di atas berikut adalah harapan dari Juari (petani dan memiliki lahan) selaku dari pihak masyarakat terkait relasi yang seharusnya terjalin diantara pemerintah dengan masyarakat yang diungkapakan dalam wawancara sebagai berikut:[28]

> Menurut saya seharusnya hubungan petani dengan pemerintah harus terjalin baik. Dalam hal ini pemerintah harus menguatkan kebutuhan pangan dengan cara tetap mempertahankan lahan pertanian, kalau bisa menambah jumlah luas lahan ada. Karena jika lahan pertanian saja sudah

---

[27] Nur Hadi, S.Pd.I., Bukan Petani dan Memiliki Lahan, *Wawancara*, Gresik, 17 Desember 2016.
[28] Juari, Petani dan Memiliki Lahan, *Wawancara*, Gresik, 30 Nopember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> tidak ada maka padi tidak akan bisa diproduksi dan kedepannya apa yang harus dimakan. Jadi pengurangan lahan pertanian yang terjadi sekarang harus dihentikan. Dari pemerintah juga harus memikirkan nasib para petani jika lahan yang ada semakin berkurang. Mengingat pangan adalah kebutuhan pokok bagi manusia untuk bertahan hidup.

Harapan tersebut juga ditambahkan oleh Nur Hadi, S.Pd (bukan petani dan memiliki lahan) selaku dari masyarakat, yang mengungkapkan bahwa seharusnya hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat terjalin baik, sebagai berikut:[29]

> Hubungan petani dengan pemerintah harus baik. Pemerintah dalam membuat kebijakan apapun dan pembangunan harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan masyarakat, terlebih jika pembuatan kebijakan dan pembangunan tersebut menyangkut lahan pertanian. Dalam hal ini lahan petanian merupakan tempat untuk memproduksi padi yang digunakan sebagai makan pokok. Selain itu pula pemerintah harus mempertahakan lahan petanian yang ada, karena jika suatau wilayah sudah tidak bisa memproduksi padi, maka wilayah tersebut akan terancam krisis pangan.

Harapan yang sama juga disampaikan oleh Alimin, S.H, M.Pd.I selaku kepala Desa Abar-abir yang mengatakan lewat wawancara:[30]

> Masyarakat perlu untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, bisa saja melalui kelompok tani maupun melalui kepala desa. Selama ini mayarakat banyak menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada kelompok tani, nantinya kelompok tadi menyampaikan kepada dinas pertanian maupun dinas ketahanan pangan. Dari sini kami berharap agar negara dapat merespon aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, agar hubungan yang baik antara negara dan masyarakat dapat terjalin.

Namun sangat disayangkan terdapat *missing link* diantara pemerintah dan masyarakat petani di Kecamatan Bungah. Sehingga membuat rantai relasi negara dan pemerintah dalam hal pertanian terputus. Wacana yang ada sudah tersusun

---

[29] Nur Hadi, S.Pd., Bukan Petani dan Memiliki lahan, *Wawancara*, Gresik, 17 Desember 2016.

[30] Alimin, S.H, M.Pd.I., Kepala Desa Abar-Abir, *Wawancara*, Gresik, 14 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan baik namun realita yang ada di lapangan tidak demikian. Negara tidak benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat petani. Selain itu juga pertemuan antara negara dengan masyarakat yang besinggungan secara langsung dengan pertanian juga sebatas survei. Wacana yang telah ada hanya sekedar menjadi bumbu pemanis dalam berjalannya negara.

Selain banyaknya peristiwa perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi industri juga terlihat perubahan kehidupan yang ada dimasyarakat Kecamatan Bungah. Perubahan tersebut banyak terjadi pada pola kehidupan masyarakat yang sebelumnya agraris sekarang menjadi masyarakat. Dari perubahan tersebut juga banyak pola kehidupan yang ada. Mulai dari banyak dibangunnya sarana dan prasarana baru untuk menunjang kehidupan yang ada dimasyarakat. Dengan banyaknya pembangunan yang dilakukan akan menambah pendapatan daerah. Karena semua bangunan yang didirikan harus melalui perizinan pemerintah terlebih dahulu. Dalam hal ini pemerintah banyak diuntungkan akibat banyaknya pembangunan yang ada, karena pendapatan yang masuk pada daerah akan semakin bertambah. Keseimbangan pertumbuhan pembangunan antara industri dan pertanian banyak mengakibatkan petumbuhan pembangunann lainnya. Dalam hal ini negara dalam melakukan pembangunan hanya memihak pada bidang industri, karena semakin banyakanya pembangunan industri akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id